

ABSTRAK

Amira Rahayu (1215010015): *Kebijakan Menteri Pendidikan Mashuri Saleh Terhadap Pendidikan Indonesia (1968-1973).*

Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan sebuah Bangsa. Di Indonesia, perjalanan sistem pendidikan Nasional telah mengalami berbagai dinamika dan transformasi sejak masa kemerdekaan. Pada masa awal Orde Baru yang menjadi saksi dari berbagai perubahan signifikan dalam kebijakan pendidikan nasional yang banyak dipengaruhi oleh kondisi historis pada masa transisi orde lama ke orde baru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang biografi Mashuri Saleh dan Keadaan Pendidikan Sebelum masa Orde Baru (1945-1966) serta kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Mashuri Saleh selama menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1968-1973.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, dengan melakukan beberapa tahapan. Tahap pertama heuristik yaitu tahap pengumpulan data yang dilakukan melalui tahapan kepustakaan dan beberapa dokumentasi yang didapatkan ketika di lapangan, tahap kedua yaitu kritik merupakan proses melakukan uji validitas, tahap ketiga yaitu interpretasi atau penafsiran dengan menganalisis dan menggali informasi menggunakan teori politik dan kebijakan publik yang digagas oleh David Easton serta teori *the great man* yang digagas oleh Thomas Carlyle, tahap terakhir yaitu historiografi mencakup metode penulisan, penyajian, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah selesai.

Adapun hasil Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan pendidikan Mashuri Saleh (1968-1973) dilandasi oleh konteks transisi Orde Baru yang memprioritaskan stabilitas dan pembangunan, serta warisan masalah pendidikan seperti ketimpangan mutu dan akses, kurikulum usang, dan ledakan penduduk. Menghadapi tantangan ini, Mashuri menerapkan pendekatan analisa sistem, mengintegrasikan pendidikan dengan Repelita I, dan terbuka pada pengaruh global. Lima landasan kebijaksanaannya menekankan pendidikan berwawasan luas, terintegrasi dengan pembangunan nasional, komprehensif, dikelola secara integral, serta memperhatikan aspek kualitatif dan kuantitatif. Upaya ini bertujuan mendepolitisasi pendidikan dan menjadikannya sarana pencerdasan bangsa yang relevan dengan kebutuhan zaman, didukung oleh lembaga seperti Badan Pengembangan Pendidikan (BPP) untuk riset dan pengembangan kebijakan berbasis data.